

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencerdaskan kehidupan bangsa sejatinya merupakan tujuan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sejak lama. Hal ini tertulis dalam Piagam Jakarta atau yang juga merupakan isi dari Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dituliskan bahwa:

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu...”¹

Jika ditinjau lebih jauh dari sekadar Piagam Jakarta, tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa telah ada dan dapat dilihat melalui pemikiran serta aksi nyata yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara di masa lampau. Pada 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta sebagai salah satu upaya kontribusi dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan. Ki Hajar Dewantara menciptakan suatu sistem pendidikan nasional yang berakar pada budaya daerah.² Ki Hajar Dewantara memiliki gagasan mengenai pendidikan dengan pendekatan budaya dan humanisasi. Pendidikan nasional mesti mengarah kepada transformasi bangsa melalui warisan pendidikan masa lalu, peluang masa kini, dan perkembangan di masa depan.³

Pendidikan pada akhirnya menjadi salah satu cara untuk mewujudkan amanat UUD 1945 tersebut. Pendidikan merupakan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Suparto Rahrdjo, *Ki Hajar Dewantara*, (Yogyakarta: Garasi, 2021), hlm. 30

³ Ace Suryadi, dkk, *Pendidikan untuk Transformasi Bangsa: Arah Baru Pendidikan untuk Perubahan Mental Bangsa*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 219

proses seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya dengan mempelajari dan mengembangkan kehidupan sepanjang hayat.⁴ Melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah berupaya menginisiasi berbagai kebijakan untuk mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi lebih berkualitas.

Dalam konteks sebuah organisasi, dilakukannya sebuah transformasi merupakan wujud adanya upaya untuk menciptakan budaya organisasi yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Organisasi pada hakikatnya adalah sesuatu yang bergerak dan memerlukan perubahan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut dapat terjadi pada struktur organisasi, mekanisme kerja, sumber daya manusia, dan budaya organisasi.⁵ Sebuah perubahan dimulai dengan menanamkan pola pikir yang dapat mengubah nasib dan arah tujuan organisasi. Untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Joel A. Barker mengatakan bahwa mengabaikan kekuatan paradigma berarti menempatkan diri di dalam resiko. Maka untuk dapat membentuk masa depan, seseorang harus lebih dulu mengubah paradigmanya terhadap sesuatu.⁶

Patricia Rogers, seorang Profesor di bidang Evaluasi Sektor Publik asal Australia, mengemukakan pendapatnya mengenai teori perubahan yang dikenal dengan *Theory of Change*. *Theory of Change* milik Rogers menjelaskan bagaimana suatu kegiatan berpengaruh kepada hasil akhir yang diinginkan. Kegiatan yang dimaksudkan berupa intervensi yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan/acara, proyek, program, kebijakan, ataupun strategi.⁷

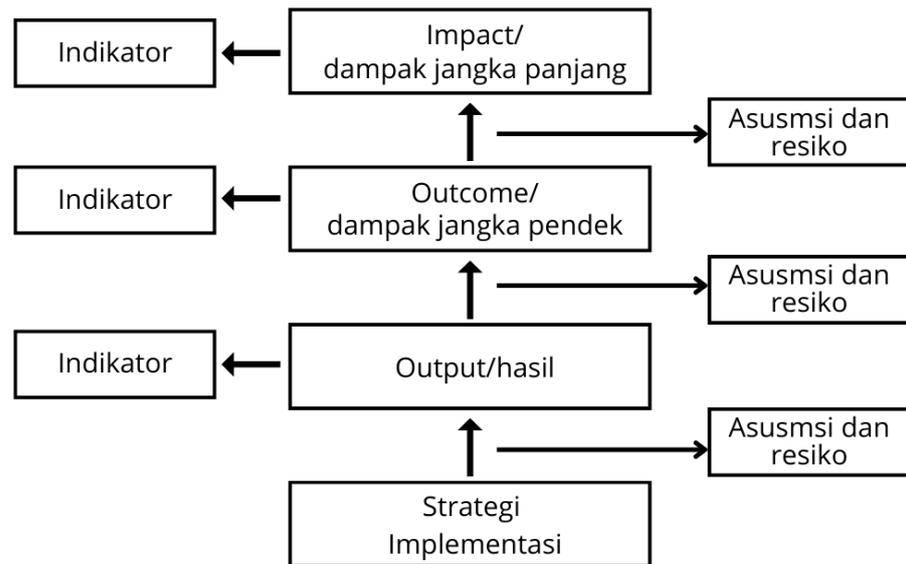
⁴ *Ibid.*, hlm. 17

⁵ Mohamad Syamsul Maarif dan Lindawati Kartika, *Manajemen Perubahan & Inovasi Upaya Meningkatkan Daya Saing Organisasi*, (Bogor: IPB Press, 2017), hlm. 4

⁶ *Ibid.* hlm. 100

⁷ Patricia Rogers, *Theory of Change: Methodological Briefs - Impact Evaluation No. 2*, (2014) (<https://www.unicef-irc.org/publications/747-theory-of-change-methodological-briefs-impact-evaluation-no-2.html>) diakses pada 24 Mei 2022 pukul 14.06

Theory of Change dapat digunakan untuk merencanakan strategi maupun program/kebijakan dengan mengidentifikasi situasi saat ini. Identifikasi dilakukan terhadap peluang juga kebutuhan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Secara sederhana, skema dari *Theory of Change* milik Rogers dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Theory of Change Milik Patricia Rogers

Teori ini membantu para pengambil keputusan dalam merancang tujuan yang realistis, akuntabel, dan membangun pemahaman bersama mengenai strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Teori ini juga dapat digunakan selama strategi dijalankan untuk mengidentifikasi indikator mana yang harus dipantau dan menjadi bahan evaluasi apakah strategi tersebut berjalan sesuai dengan rencana.

Di Indonesia, transformasi kebijakan pada sektor pendidikan telah mengalami pasang surut. Dahulu, Indonesia mengenal kebijakan mengenai wajib belajar enam tahun. Kebijakan ini muncul pada tahun 1950, yang selanjutnya pada 1984, di era kepemimpinan Presiden Soeharto dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Natosusanto, program tersebut akhirnya diberlakukan secara resmi. Perjalanan kebijakan wajib belajar ini tidak berhenti sampai di situ, pada

1994 dan 2015, program wajib belajar mengalami peningkatan menjadi sembilan dan dua belas tahun.⁸

Dalam transformasi kebijakan yang kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah (transformasi sekolah), Indonesia pernah mengenal sebuah program inisiasi pemerintah yang disebut dengan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Program ini memfokuskan pada kesiapan peserta didik agar mampu bersaing di kancah internasional. Sekolah diharapkan mampu memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditambah dengan standar pendidikan dari negara-negara maju. Dalam sekolah RSBI, ciri yang dapat dilihat dengan jelas adalah pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Sejak 2007, pemerintah melakukan pembinaan kepada sekolah rintisan tersebut agar kemudian bertransformasi menjadi SBI.⁹

Kemudian program SBI bertransformasi kembali menjadi program Sekolah Model. Dalam kebijakannya ini, pemerintah mengharapkan adanya dua capaian hasil yang berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah, yaitu sekolah berbasis SNP melalui penjaminan mutu secara mandiri dan pengimbasan terhadap sekolah lain. Selain memberikan intervensi berupa dana bantuan, pemerintah melakukan pendampingan terhadap Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan pendampingan di bawah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), sekolah diharapkan mampu menerapkan SPMI yang terstruktur, holistik, dan berkelanjutan.¹⁰

⁸ Petik Matanasari, *Ini Ibu Budi: Mengenang Lahirnya Program Wajib Belajar*, 2019 (<https://tirto.id/ini-ibu-budi-mengenang-lahirnya-program-wajib-belajar-dngo>) diakses pada 26 Februari 2022 pukul 09.33

⁹ Hidayat Ginanjar, *Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) Antara Ideal dan Dilematis*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2012) <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/22/17> diakses pada 26 Februari 2022 pukul 09.33

¹⁰ Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, *Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan*, 2016 (<http://repositori.kemdikbud.go.id/4262/1/044.pdf>) diakses pada 26 Februari 19.30

Belum tuntas dengan Sekolah Model, kebijakan pendidikan di Indonesia kembali dikenalkan dengan program Sekolah Rujukan. Tidak jauh berbeda dengan dua program sebelumnya, Sekolah Rujukan merupakan sekolah yang telah mengimplementasikan/memenuhi SNP dalam manajemen sekolahnya. Pemerintah memberikan intervensi berupa dana pendidikan kepada sekolah-sekolah yang secara umum memenuhi kriteria yang menunjukkan keunggulan. Seperti memiliki akreditasi A atau yang terbaik di wilayahnya, ekosistem sekolah yang kondusif, budaya mutu, melaksanakan program penguatan karakter, dan lokasi sekolah yang strategis.¹¹

Dicanangkannya berbagai kebijakan tentang transformasi sekolah dari waktu ke waktu merupakan salah satu bukti bahwa peningkatan mutu pendidikan selalu menjadi sesuatu yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kebijakan program dengan jangka waktu yang relatif singkat menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu melakukan refleksi lebih dalam lagi untuk menemukan kebijakan yang benar-benar selaras dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Dalam Rencana Strategis (renstra) Kemendikbud tahun 2015-2019, kebijakan pendidikan Indonesia difokuskan kepada pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi lulusan, dan tata kelola budaya dan bahasa. Meski menunjukkan peningkatan di beberapa bidang garapannya, permasalahan pendidikan masih terus bermunculan seiring dengan kehidupan masyarakat yang mengalami dinamika. Salah satu yang kerap menjadi sorotan adalah kualitas hasil pembelajaran peserta didik yang dihasilkan.

Akhir-akhir ini masyarakat terbiasa dengan berita terkait hasil survei yang dikeluarkan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA). PISA merupakan sebuah studi yang memfokuskan pada evaluasi persoalan sistem pendidikan. Survei ini diikuti lebih dari 70 negara dengan sasaran peserta didik berusia 15 tahun sebagai

¹¹ Irsyad Zamjani, dkk, *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, 2020), hlm. 23

respondennya. Pada hasil survei PISA 2018, Indonesia memiliki hasil yang cukup baik dalam hal akses pendidikan, yaitu naik dari 39% (2000) menjadi 85% (2018).¹² Namun peningkatan akses pendidikan ini berbading terbalik dengan hasil survei terkait ketercapaian hasil pembelajaran (literasi dan numerasi). Hasil survei ini menghasilkan skor rata-rata 371 (membaca), 379 (matematikan), dan 389 (sains). Angka ini berada di bawah skor rata-rata yang dikeluarkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) selaku penyelenggara PISA, yaitu 487 (membaca, matematika) dan 489 (sains).

Berdasarkan hasil survei tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebutkan dalam siaran persnya tertanggal 3 Desember 2019, bahwa hasil survei PISA tersebut merupakan suatu langkah berharga untuk mengevaluasi dan berbenah agar kualitas pendidikan di Indonesia menjadi fokus pemerintah untuk lima tahun ke depan.¹³ Menciptakan sumber daya yang unggul sudah sepatutnya menjadi perhatian utama agar kelak, bukan hanya akses ke pendidikan yang merata tetapi juga mutu lulusan yang mampu bersaing di kancah global.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah melalui Kemendikbudristek menginisiasi kebijakan pendidikan paling mutakhir yang dikenal dengan Merdeka Belajar. Dalam renstra Kemendikburistek 2020-2024, dituliskan bahwa:

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan

¹² *Pendidikan di Indonesia: Belajar dari Hasil PISA 2018*, (Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian Pendidikan Kemendikbud, 2019), hlm. 184

¹³ Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Tanggapi Hasil PISA 2018, Mendikbud: Ini Jadi Masukan yang Berharga*, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/12/tanggapi-hasil-pisa-2018-mendikbud-ini-jadi-masukan-berharga> diakses pada 26 Februari 2022 pukul 19.52

mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.¹⁴

Kebijakan mengenai Merdeka Belajar disusun sedemikian rupa untuk menghadirkan pendidikan yang lebih dapat mewartakan karakteristik bangsa Indonesia yang beragam. Merdeka Belajar dalam ranah persekolahan menawarkan pendidikan yang lebih adaptif dari segi pembelajaran dan manajemen sekolah. Praktik yang ditawarkan tidak mengekang dan menghargai nilai keberagaman dengan suasana keterbukaan yang menyenangkan. Kurikulum dalam Merdeka Belajar akan bersifat fleksibel, berdasarkan kompetensi, dan fokus pada pengembangan karakter dan *softskill*.¹⁵

Dalam kurun waktu 2020-2021, kebijakan Merdeka Belajar telah melahirkan banyak program pendidikan yang disusun ke dalam episode-episode. Salah satunya adalah Merdeka Belajar Episode Ketujuh tentang Program Sekolah Penggerak. Secara singkat, Program Sekolah Penggerak adalah program yang memfokuskan perhatian kepada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu: mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan transformasi sekolah yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun beberapa hal dijadikan evaluasi terkait belum maksimalnya program transformasi sekolah yang sudah ada. Program-program tersebut cenderung menargetkan sekolah yang sudah memiliki kualitas cukup baik, hal ini bertolak belakang dengan tujuan yang seharusnya mendorong sekolah dengan kualitas rendah/sedang, dan juga terkait upaya pengimbasan yang belum terealisasi dengan maksimal. Hal

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*, 2020 (<https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/RENSTRA-KEMENDIKBUD-full-version.pdf>) diakses pada 26 Februari 2022 pukul 22.32

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 43

ini disebabkan oleh dua hal utama. *Pertama*, tidak ada upaya intervensi berupa peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru terkait strategi pengimbasan. Inilah yang menyebabkan sekolah kesulitan untuk menyebarkan praktik baik meskipun mutu pendidikan di sekolah sudah meningkat. *Kedua*, tidak adanya dukungan kelembagaan di tingkat daerah maupun nasional untuk membangun ekosistem yang mendukung upaya pengimbasan. Dengan melakukan refleksi dari evaluasi program sebelumnya dan praktik baik yang dilakukan oleh organisasi (baik pemerintahan/non pemerintahan) nasional dan internasional, maka pemerintah mendesain program Sekolah Penggerak dengan serangkaian intervensi yang diadopsi dari faktor-faktor yang menjadi titik tolak keberhasilan program-program terdahulu.¹⁶

Sekolah Penggerak diharapkan mampu melakukan pengimbasan kepada sekolah lain untuk turut serta dalam mentransformasi sekolahnya. Program Sekolah Penggerak bersifat kolaboratif yang tidak hanya melibatkan satuan pendidikan terkait dengan Kemendikbudristek, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat. Maka dalam pelaksanaannya, program ini dilaksanakan secara holistik, kolaboratif, dan gotong royong.

SMA Negeri (SMAN) 1 Babakan Madang adalah salah satu Sekolah Penggerak yang ada di Kabupaten Bogor dan satu-satunya di Kecamatan Babakan Madang. SMAN 1 Babakan Madang ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Nomor 6555/C/HK.00/2021 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan I.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kepala SMAN 1 Babakan Madang, awal mula SMAN 1 Babakan Madang mencalonkan diri sebagai Sekolah Penggerak adalah karena adanya

¹⁶ Irsyad Zamjani, dkk, *Naskah Akademik Program Sekolah Penggerak*, (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud, 2020), hlm. 25-35

himbauan dari Kepala Kantor Cabang Dinas Wilayah I yang mewakili Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Himbuan tersebut berisikan arahan bagi seluruh kepala sekolah yang ada di Wilayah I agar mencalonkan diri dalam Program Sekolah Penggerak Angkatan I. Program Sekolah Penggerak yang tidak menargetkan sekolah tertentu membuka peluang yang sama bagi setiap sekolah. Kepala SMAN 1 Babakan Madang menyatakan bahwa pemahaman terkait Program Sekolah Penggerak didapatkan seiring dengan berjalannya proses seleksi. Dan di samping proses yang terus berjalan, SMAN 1 Babakan Madang tetap melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai rencana yang telah disusun.

SMAN 1 Babakan Madang pada akhirnya terpilih menjadi salah satu pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan I yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Serangkaian proses seleksi memberikan sebuah pemahaman terkait konsep Program Sekolah Penggerak yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya sekolah. Yang dari sana disadari bahwa Program Sekolah Penggerak sangat sejalan dengan rencana kerja yang telah ada sebelumnya di SMAN 1 Babakan Madang.¹⁷

Sejalan dengan statusnya sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak, SMAN 1 Babakan Madang di bawah kepemimpinan kepala sekolah mulai melakukan transformasi budaya sekolah sesuai dengan butir-butir yang ada dalam Program Sekolah Penggerak. Salah satunya adalah transformasi sistem pembelajaran menjadi pembelajaran dengan paradigma baru.

Peneliti melihat bahwa intervensi pada sistem pembelajaran di Sekolah Penggerak merupakan hal menarik. Dalam Program Sekolah Penggerak, kurikulum yang diterapkan dikenal dengan nama Kurikulum Merdeka. Sebagai seorang praktisi pendidikan, Kepala SMAN 1 Babakan Madang menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka adalah sebuah transformasi dari pembelajaran paradigma lama ke

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala MAN 1 Babakan Madang (13 Juni 2022 pukul 09.10 WIB)

pembelajaran paradigma baru. Yang dalam hal ini adalah upaya untuk mengembalikan esensi pendidikan kepada yang seharusnya, yaitu filosofi milik Ki Hajar Dewantara. Melalui transformasi ini, diharapkan akan tercipta sekolah dengan masyarakat pembelajar di dalamnya. Menurut penuturan Kepala SMAN 1 Babakan Madang, diterapkannya Kurikulum Merdeka bagi peserta didik berdampak pada perubahan karakter peserta didik. Peserta didik cenderung lebih aktif dan komunikatif dalam proses pembelajaran. Dan menurutnya, Kurikulum Merdeka mengasah peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, bertanggungjawab, kreatif, dan mendorong terciptanya peserta didik dengan Profil Pelajar Pancasila.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, diperoleh keterangan bahwa SMAN 1 Babakan Madang telah menerapkan Kurikulum Merdeka bagi peserta didik kelas sepuluh (X). Dalam kurikulum tersebut, struktur dan perangkat pembelajaran terbagi atas dua; *pertama*, pembelajaran berbasis intrakurikuler yang merupakan pembelajaran tatap muka di kelas untuk setiap mata pelajaran; *kedua*, pembelajaran berbasis proyek yang merupakan integrasi seluruh mata pelajaran yang ada. Pembelajaran berbasis proyek tersebut merupakan aplikasi dari praktik dan pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.¹⁹

Pembelajaran Berbasis Proyek Profil Pelajar Pancasila menekankan pada proyek pembelajaran yang tidak lagi berbasis mata pelajaran. Pembelajaran Berbasis Proyek Profil Pelajar Pancasila ini memiliki konsep *blended* antar mata pelajaran. Pembelajaran tersebut diarahkan agar peserta didik mampu melakukan sebuah perencanaan aksi, proses penelitian, sampai kepada membuat sebuah produk yang dapat didemonstrasikan. Pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan berdasarkan tema-tema yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMAN 1 Babakan Madang (24 Februari 2022 pukul 07.49 WIB)

Tema-tema tersebut berasal dari isu lokal dan global. Fokus daripada tema tersebut dilimpahkan kepada sekolah untuk dikembangkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada di sekitar. Dalam pembelajaran proyek ini, baik peserta didik maupun fasilitator proyek (guru), diberi kebebasan untuk menentukan sumber belajar. Hal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Sekolah juga dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat atau *stakeholder* terkait untuk menjalankan pembelajaran proyek. Seperti yang dilakukan oleh SMAN 1 Babakan Madang yang memfasilitasi peserta didik dengan memberikan peluang untuk peserta didik belajar melalui pengalaman nyata dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar dari berbagai sumber.

Keberadaan Program Sekolah Penggerak menjadi angin sejuk dalam upaya transformasi sekolah di Indonesia. Namun, sumber literatur mengenai Sekolah Penggerak yang masih jarang ditemukan membuat peneliti tertarik untuk mengeksplorasi program tersebut dengan membuat sebuah penelitian yang berfokus pada penyebarluasan praktik baik dari implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak; yaitu bagaimana salah satu Sekolah Penggerak melakukan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek dalam rangka penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oleh karenanya, disusunlah skripsi ini dengan judul ***“Manajemen Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMAN 1 Babakan Madang)”***

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah “Manajemen Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang). Adapun sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).
2. Pengorganisasian Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).
3. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).
4. Evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan sub fokus penelitian di atas, maka pertanyaan yang akan diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang)?
2. Bagaimana pengorganisasian Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang)?
3. Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang)?
4. Bagaimana evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Perencanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).
2. Mendeskripsikan Pengorganisasian Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).
3. Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).
4. Mendeskripsikan Evaluasi Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang).

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk pembaca baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan penguatan terkait Manajemen Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak yang ada di SMA Negeri 1 Babakan Madang).

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Manajemen Pembelajaran khususnya Manajemen Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Program Sekolah Penggerak (Studi Kasus SMA Negeri 1 Babakan Madang). Penelitian ini juga menambah pengalaman praktis peneliti lewat

pengamatan langsung yang dilakukan selama mengumpulkan data penelitian.

b. Manfaat Bagi Sekolah

Penelitian ini dapat mendeskripsikan praktik baik berupa Pembelajaran Berbasis Proyek yang merupakan upaya mendukung penguatan Profil Pelajar Pancasila dalam Program Sekolah Penggerak yang ada di sekolah kepada khalayak. Kemudian hasil penelitian ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas manajemen Pembelajaran Proyek Penguatan Profil Pelajara Pancasila selanjutnya.

c. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk mengetahui tentang program sekolah penggerak khususnya dalam hal pembelajaran proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

